

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH  
(Studi Kasus Bank Sampah Di Desa Bangun Rejo Kecamatan  
Tenggarong Seberang Periode Tahun 2015-2019)**

**Ni Made Dwi Piantari**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 7, Nomor 4, 2020**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**(Studi Kasus Bank Sampah Di Desa Bangun Rejo Kecamatan  
Tenggarong Seberang Periode Tahun 2015-2019)**

**NiMadeDwiPiantari<sup>1</sup>, AnwarAlaydrus<sup>2</sup>, DaudKondorura<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2015-2019) dan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2015-2019). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Library Research dan Field Work Research yaitu observasi dan wawancara serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2015-2019) yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.*

*Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2015-2019) dapat dikatakan terimplementasi hal tersebut karena dapat dilihat dari adanya partisipasi dari masyarakat yang sangat antusias untuk ikut melakukan program bank sampah hingga semenjak adanya program bank sampah membuat Desa Bangun Rejo menjadi bersih dan membuat seluruh sadar akan kebersihan.*

***Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Bank Sampah, Kutai  
Kartanegara***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dwipiantari41@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeolaan Sampah telah merubah paradigma dalam pengelolaan sampah dengan cara kumpul, angkut dan buang, menjadi kumpul, pilah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum sampah dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dengan adanya kebijakan tersebut salah satu program Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), yakni penyediaan Bank Sampah atau Satu Desa Satu Bank Sampah mulai direalisasikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, khususnya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Sejauh ini sudah ada sekitar 50 bank sampah terbentuk di Kecamatan Tenggarong Seberang salah satunya yang ada di Desa Bangun Rejo. Sampah selalu menjadi masalah dimana saja sampah yang tidak tertanganin dengan baik akan mendatangkan banyak masalah yang terkait dengan lingkungan kesehatan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi***

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Kebijakan***

Carl J Friedrich (dalam Irfan Slamy 2004:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.

### ***Kebijakan Publik***

Friedrich dalam (Wahab,2008:3) Kebijakan Publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang sangat crucial.

Hoogwood dan Guun dalam Wahab (2005:70-78) mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik, yaitu :

- a. Kondisi Eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau keadaan serius;
- b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu sumber daya yang cukup memadai;
- c. Paduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Program akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal;
- e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan yang saling ketergantungan harus kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kesatuan yang sempurna.

### ***Model-model Implementasi Kebijakan Publik***

Dimensi paling inti dari kebijakan public adalah proses kebijakan. Kebijakan Publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan system yang bergerak dari satu bagian ke bagian lainnya secara sinambungan, saling menentukan dan saling membentuk.

#### **1. Model Merilee S. Grindle (1980)**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Griendle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

#### **2. Model George C. Edward III (1980)**

Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel teraebut saling berhubungan satu sama lain.

##### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyarat agar implementor menegetahui apa saja yang harus dilakukan. Apa saja yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*).

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

**3. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)**

Selanjutnya mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

**4. Model Donalds S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu;

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termaksud di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana

sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fakta secara menyeluruh tentang pengelolaan bank sampah di desa bangun rejo. Penentuan sumber informasi (informan) dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Informasi tersebut di dukung oleh dokumen-dokumen yang ada di desa tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi,wawancara,dokumentasi). Serta menganalisis menggunakan teori Miles dan Huberman Saldana(2014:14) Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: data kondensasi, penyajian data dan gambar kesimpulan/verifikasi).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Komunikasi***

Sehubungan dengan faktor komunikasi dalam implementasi menurut teori Edwar III (dalam Widodo, 2008 : 96) dijelaskan bahwa keberhasilan kebijakan mensyarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standard pelayanan minimal dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan ketua program bank sampah salah satunya Bank Sampah Bunda “BSB”. Hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten dalam membuat peraturan ini bersama DPR kota menginginkan masyarakat yang lebih memperdulikan terhadap lingkungan yang bersih tanpa adanya sampah yang berserakan yang ada di kota maupun desa yang ada diseluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Sumber Daya***

Faktor sumber daya juga punya peran penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Faktor sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penanganan pengelolaan sampah agar dapat terlaksana dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta dijadikan sampah sebagai sumber daya dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai wewenang salah satunya memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan, penanganan dan pemanfaatan sampah dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas norma, standard, prosedur dan kriteria. Hal yang dapat dilihat dari semakin banyak masyarakatnya mengikuti kegiatan program bank sampah dan semakin menumpuk sampah rumah tangga sehingga fasilitas-fasilitas untuk penunjang program bank sampah tersebut.

### ***Disposisi/Sikap Pelaksana***

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hasil keseluruhan membuktikan bahwa fasilitas tersedia maka masyarakat yang mengikuti akan semakin mendukung dan akan semakin semangat untuk membersihkan desa terutama rumah mereka sendiri.

Dengan begitu alat-alat sebagai penunjang kegiatan program bank sampah ini seperti arko, timbangan juga sangat penting karena itu di gunakan untuk membawa sampah dari rumah ke tempat penimbangan dan penimbangan yang di pakai juga harus besar karena sampah yang semakin harinya banyak sampah-sampah berat yang terkumpulkan. Oleh karena itu Pimpinan dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus memiliki kemauan dan keinginan serta kecenderungan untuk melaksanakan pengelolaan sampah tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan tercapai.

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur Birokrasi ini membuktikan bahwa dalam setiap program juga harus di buat struktur untuk membuat bagian dalam penanganan serta memiliki tanggung jawab dalam setiap tugasnya sehingga berjalannya program bank sampah terutama bank sampah bunda ini semakin sukses dan masyarakatnya selalu menjaga kebersihan desa dan bukan cuma Desa Bangun Rejo melainkan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk yang menjalankan tugas tersebut yang terlibat juga harus tetap mengikuti dan melaksanakan pengelolaan sampah di sekitar lingkungan rumah agar mencerminkan bahwa mereka bukan cuma menjalankan tugas tapi menerapkan kembali di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

### ***Faktor pendukung***

Dengan adanya faktor pendukung menjadi salah satu keunggulan program bank sampah walaupun tidak adanya dukungan dari kecamatan program ini tetap berjalan karena masih banyak dukungan dari perusahaan yang ada di sekitar desa sehingga hal ini menjadi bermanfaat bagi seluruh masyarakat maupun hanya dengan dana seadanya yang tetapi program ini tetap bisa berjalan sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan daerah.

### ***Faktor penghambat***

Dengan adanya faktor penghambat ini dapat dilihat dari kurang adanya partisipasi masyarakat untuk membantu mengurus sehingga ketika melakukan penimbangan pengurus harus mengatur jadwal untuk mendatangi setiap RT yang akan dilakukan penimbangan sedangkan sampah yang dikumpulkan semakin lama semakin banyak sehingga pengurus yang sekarang sedikit mengalami kesulitan untuk melakukan penimbangan.

### **Pengolahan Sampah**

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara di selenggarakan berdasarkan :

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas kesadaran;
- f. Asas kebersamaan;
- g. Asas keselamatan;
- h. Asas keamanan;
- i. Asas nilai ekonomi;
- j. Asas pengelolaan mulai dari sumber;
- k. Asas penghasil sampah sampah membayar;
- l. Asas produk ramah lingkungan;
- m. Asas internalitas biaya pengelolaan sampah;
- n. Asas kehati-hatian awal;
- o. Asas Transparansi;
- p. Asas akuntabilitas;
- q. Asas efisiensi; dan
- r. Asas efektivitas;

(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali, daur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

(3) Pengelolaan sampah di selenggarakan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. Menjaga Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;



- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
- d. Memiliki sampah sebagai sumberdaya yang memiliki nilai tambah (added value)

### **2.1. Pengumpulan Sampah**

Pengumpulan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir dan dimana yang dimaksud dalam Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai TPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sejenis sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi di lapangan masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada waktu dan tempatnya.

### **2.2. Pemilahan sampah**

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, pertama kali di lakukan adalah pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah akan tetapi pelaksanaan program tersebut belum terlaksana dengan baik. Sebelum diangkut sampah harus dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah yang dapat digunakan kembali atau tidak dan selebihnya sampah dijual kepada pemulung atau dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang baru.

### **2.3. Pengangkutan sampah**

Pengangkutan sampah dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPAS

### **2.4 Pemrosesan Akhir Sampah**

Pemrosesan Akhir Sampah dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga adalah tempat pemrosesan yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan dan Tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan sampah yang bersumber dari 2 (dua) daerah atau lebih.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian maka bab ini akan memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian, Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 04 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah(studi kasus bank sampah di desa bangun rejo kecamatan tenggarong seberang periode tahun 2015-2019) dengan menggunakan fokus Goerge C Edward sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam pelaksanaan program bank sampah yang ada di desa bangun rejo menjadi ukuran keberhasilan ialah dibuktikan dari bagaimana cara memberikan informasi dengan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan baik karena sudah hampir setiap desa menerapkan program ini.
2. Sumberdaya dari segi sumber daya manusia di Desa Bangun Rejo berupa jumlah pengawas yang di tunjuk dari kantor desa untuk mengawasi dan memantau seluruh kegiatan program bank sampah seperti penimbangan sampah yang di lakukan di setiap pos-pos penimbangan dan dari segi sumber daya peralatan dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut masih belum mencukupi untuk melaksanakan program tersebut sehingga hal ini membuat kesulitan bagi ketua program bank sampah.
3. Disposisi dapat berupa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bank sampah di Desa Bangun Rejo dan dilihat dari kinerja pegawai dalam memantau petugas-petugas dilapangan agar kegiatan program bank sampah berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang sudah di tentukan dan selalu berkoordinasi antara perangkat daerah dengan lembaga pemerintahan,masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
4. Stuktur Birokrasi ditandai dengan adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang membawahi bidang persampahan yaitu Kepala Seksi Persampahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani pengelolaan persampahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berjalannya program bank sampah yang baik seperti bagaimana pemerintah dapat membagi tugasnya untuk mengawasi program bank sampah.
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi peraturan daerah tersebut adalah kurang adanya bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah kepada program bank sampah hal ini yang mengakibatkan sulit untuk ketua dalam menjalankan tugasnya sehingga ketua bank sampah ini mengusulkan lebih sering meminta bantuan kepada pihak perusahaan.

### **A. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan dikemukakan maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan bank sampah karena hingga saat ini Bank Sampah Bunda “BSB” masih belum memiliki tempat pemrosesan akhir meminta bantuan kepada pihak perusahaan.
2. Pihak kecamatan harus selalu mengetahui bagaimana kondisi Desa Bangun Rejo dalam setiap menjalankan setiap program yang di buat oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan begitu juga sebaliknya jika membuat program maks seluruh kecamatan dapat mengetahuinya.
3. Pihak Desa Bangun Rejo selalu memantau apa saja kekurangan yang di butuhkan Bank Sampah Bunda “BSB” seperti contohnya harus menyediakan lahan untuk TPA karena saat ini masih terkendala untuk Tempat Pemrosesan Akhir.
4. Bank Sampah Bunda mengajak seluruh masyarakat yang belum mengikuti program ini untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berceceran di sekitar lingkungan kita karna hal ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan sekitar melainkan untuk menyadari bahwa sampah yang tidak terpakai ini bisa di kumpulkan dan bisa menghasilkan uang.
5. Seharusnya ada pembicaran kembali dari pihak UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak kecamatan hal ini bertujuan agar pihak kecamatan juga ikut serta membantu kegiatan program Bank Sampah Bunda “BSB” dengan tujuan untuk menjadikan Desa yang ada di kecamatan Tenggarong Seberang menjadi bersih dan rapi seperti halnya Desa Bangun Rejo.

**Daftar Pustaka**

- Abadin. Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Pancur Siwah
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Creswell, Jhon W, Research Desaign: Qualitative and Quantitative Approac London: Sage Publication. 1993
- Dunn, Wiliam N. 2000. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT Praseti Wedia Pratama
- Edwars III, Gorge C. 1980. Implementasi Publik Policy. Texas University, Congressional Quartely Press
- Indiahono, Dwiyanto 2009. “Kebijakan Publik” Gava media
- Islamy, M. Irfan. 2001. Policy Analisis. Universal Brawijaya. Malang
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier, 1983. Implementasi Public Policy, New York : Harper Coilins
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebok, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

**Dokumen-Dokumen**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tetang Pengelolaan sampah
- Peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalimantan Timur